

**ANALISIS KINERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DALAM
MENGENDALIKAN INFLASI DIKOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2019**

Atin ramayani, Jamhur poti, Ramadhani Setiawan
E-mail: atinramayani01@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Inflation is an economic condition that shows a general and continuous trend of increasing price levels. Inflation is a measure of people's purchasing power and macroeconomic stability. Low inflation and is a prerequisite for economic growth that will have an impact on people's welfare. The purpose of this study was to analyze the performance of the regional inflation control team (TPID) in the context of controlling inflation in the Tanjungpinang in accordance with presidential decree No. 23 of 2017, and Mayor's Decree number 40 of 2020 Tanjungpinang concerning the Regional Inflation Control Team (TPID). This research method is used a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study with 9(nine) informants show that regional inflation control has been carried out well, with a task force that has been formed from a coordination meeting that is routinely held once a month, the implementation of cooperation in controlling the distribution of jbk using fuel cards, our food house (RPK), the implementation of the 4K strategy (availability of supply, smooth distribution, affordability and effective communication), the conclusion is that the implementation of the Tanjungpinang inflation control policy has been maximized according to the policies taken in terms of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability in control inflation in order to stabilize regional inflation in the city of Tanjungpinang. At the end of this research, it is suggested to optimize the inflation control in order to maintain the inflation rate in the Tanjungpinang city area.

Keywords: Analysis, Inflation, Performance, Control

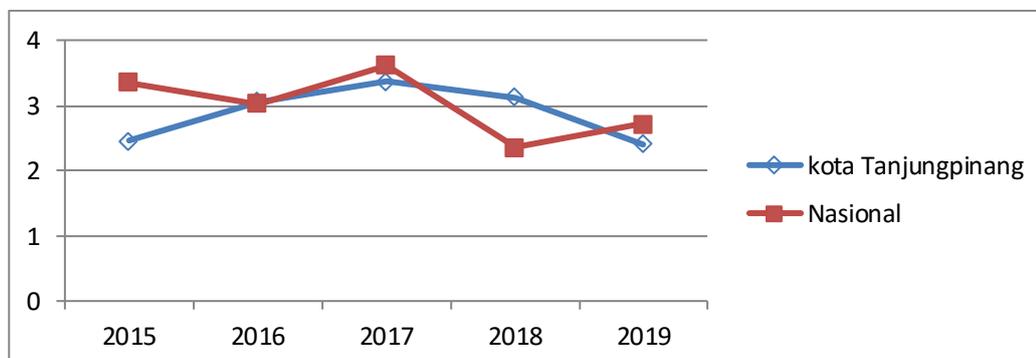
I. Pendahuluan

Globalisasi sering kali dinyatakan sebagai suatu hal yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi diberbagai Negara didunia. Perubahan ekonomi global yang terjadi secara cepat, berpengaruh pada menurunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, adapun upaya pemerintah dalam mencapai kondisi perekonomian yang ideal salah satu upayanya yaitu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi. Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah suatu kelompok atau tim yang dibentuk khusus untuk mengendalikan inflasi dengan bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan beberapa dinas

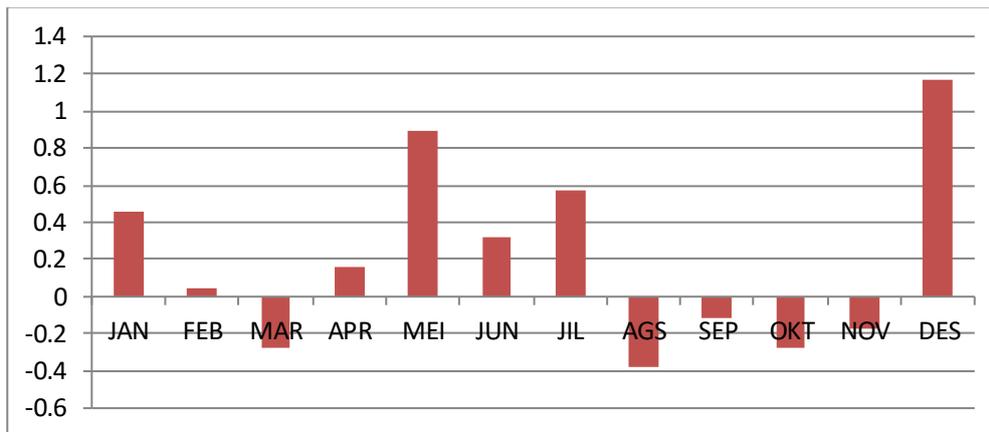
instansi terkait. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan forum koordinasi yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk membantu pencapaian tingkat inflasi dan menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tujuan dari pembentukan TPID adalah untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan upaya pengendalian inflasi daerah dalam rangka pencapaian target inflasi yang ditetapkan guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas pada khususnya dan nasional pada umumnya sehingga kestabilan makro ekonomi dapat terjaga. Tujuan dari pembentukan TPID adalah untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan upaya pengendalian inflasi daerah dalam rangka pencapaian target inflasi yang ditetapkan guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas pada khususnya dan nasional pada umumnya sehingga kestabilan makro ekonomi dapat terjaga. Pada tahun 2018 Tim pengendalian inflasi daerah kota Tanjungpinang menjadi daerah peringkat terbaik dalam mengendalikan inflasi daerah, pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,36 persen dan merupakan inflasi terendah selama periode 2015-2019. Pada Rakornas diselenggarakan penyerahan piagam penghargaan ke pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik, TPID inovatif serta TPID berprestasi dan terbaik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kota Tanjungpinang berhasil meraih predikat sebagai TPID berprestasi dan terbaik se-Indonesia untuk wilayah Sumatera. Upaya keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang dalam pengendalian inflasi di daerah telah membuahkan hasil.

Tabel 1. Tingkat Inflasi Tanjungpinang-Nasional



Pergerakan laju inflasi di Tanjungpinang terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun menurut BPS (Badan Pusat Statistik), perkembangan pada tahun 2015-2019 di Tanjungpinang sedikit berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 inflasi kota Tanjungpinang mencapai sebesar 2,46 persen dan merupakan inflasi terendah ketiga selama lima tahun terakhir. Tingkat inflasi pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,06 persen, lebih tinggi 0,60 poin dibanding tahun 2015. Pada tahun 2017 inflasi di kota Tanjungpinang tercatat 3,37 persen lebih tinggi 0,31 poin. Sementara pada tahun 2018 tercatat sebesar 2,36 persen dan merupakan inflasi terendah selama periode 2015-2019. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun ini terutama disebabkan rendahnya tingkat inflasi kelompok bahan makanan. Pada tahun 2019 tingkat inflasi tercatat sebesar 2,40 persen dan merupakan inflasi terendah kedua setelah inflasi tahun 2018. Kelompok bahan makanan merupakan faktor pemicu meningkatnya inflasi.

Tabel 2 Tingkat Inflasi Perbulan Tahun 2019



Sepanjang tahun 2019 di kota Tanjungpinang terjadi inflasi sebanyak 7 bulan, Inflasi tertinggi terjadi pada bulan desember, yaitu 1,17 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan february sebesar 0,04 persen. Penyebab utama kenaikan indeks harga yang terjadi pada bulan desember adalah naiknya barang dan jasa yang tergabung dalam kelompok bahan makanan dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif Dengan pendekatan kualitatif. yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sebagian pendapat mengatakan bahwa menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kota Tanjungpinang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Pemko Tanjungpinang sekretariat daerah, yang merupakan salah satu daerah yang membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka pengendalian inflasi daerah kota Tanjungpinang dan merupakan daerah yang memiliki tingkat kebutuhan masyarakatnya yang tinggi. Ini sekaligus menjadi tempat peneliti dalam mencari data dan mengumpulkan data dalam kaitan memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Fokus penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana kinerja tim pengendalian inflasi daerah dalam mengendalikan inflasi di kota Tanjungpinang. Data merupakan catatan atas kumpulan fakta yang ditemukan dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa angka dan kata-kata. Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu Data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Dan adapun Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi mengenai kinerja tim pengendalian inflasi daerah dalam mengendalikan inflasi di kota Tanjungpinang. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah kepala bidang perekonomian dan SDA, kepala bagian Ekonomi, staf perekonomian, kepala badan pusat statistik (BPS), kepala kantor bulog, kepala perdagangan dan perindustrian, kepala pertanian, perikanan, dan pangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menganalisis lebih mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Data yang dimaksud dalam hal ini yaitu wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan dalam fokus penelitian. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perekonomian, sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program pengendalian inflasi dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa daerah dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Pelaksanaan Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi di kota Tanjungpinang sudah memasuki ke empat tahun terhitung dari tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah mampu membantu mengurangi kebutuhan masyarakat dan menstabilkan inflasi daerah kota Tanjungpinang. Terbukti bahwa dari data BPS jumlah angka inflasi daerah tahun 2015-2019 di kota Tanjungpinang telah menurun setiap tahunnya, salah satunya berkat adanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tidak hanya itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut dapat membantu dalam mengendalikan gejolak harga bahan pangan dan jasa yang melonjak tinggi yang mengakibatkan ketidakstabilannya angka inflasi. Secara tidak langsung hal ini membuktikan pelaksanaan kegiatan pengendalian oleh tim pengendalian inflasi daerah di kota Tanjungpinang memberikan hasil yang baik dengan kestabilan angka inflasi.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa program tim pengendalian inflasi daerah ini juga memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama dalam kestabilan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya akan terus bisa mengendalikan kestabilan kebutuhan masyarakat.

Pada pembahasan Analisis ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala bidang perekonomian dan SDA, kepala bagian ekonomi, staf perekonomian, kepala badan pusat statistik (BPS), kepala kantor bulog, kepala perdagangan dan perindustrian, kepala pertanian, perikanan, dan pangan. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil kinerja tim pengendalian inflasi daerah dalam mengendalikan inflasi di kota Tanjungpinang. Pertanyaan wawancara peneliti ambil dari perdimensi dari teori Agus Dwiyanto, terdapat lima kriteria penilaian analisis kinerja tersebut, yaitu :

Produktifitas

Produktifitas merupakan rasio antara input dan output yang tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, namun juga mengukur efektivitas pelayanan. Berdasarkan informasi mengenai inflasi tahunan dan bulanan yang terjadi di kota Tanjungpinang, maka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memproses informasi-informasi tersebut dalam rangka melakukan pengendalian inflasi kota Tanjungpinang. Setiap bulannya tim pengendalian inflasi daerah melaksanakan rapat koordinasi menyusun sasaran kerja dan kebijakan yang bertujuan untuk memproses setiap informasi inflasi dari setiap laporan masyarakat, dan dari setiap instansi. Setiap instansi yang berkaitan dengan perkembangan inflasi daerah memaparkan hasil pelaksanaan programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan akan disimpulkan untuk membentuk program sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam mengendalikan inflasi daerah kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara beberapa informan terkait produktifitas pengendalian inflasi daerah kota Tanjungpinang program yang dibentuk sesuai dengan rekomendasi kebijakan yang diambil dengan melihat permasalahan perekonomian daerah dan perkembangan inflasi di daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibentuk tentunya mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi,

pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat.

Kualitas layanan

Kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Pelayanan publik merupakan serangkaian atau sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat karena pemerintah dan Negara didirikan oleh masyarakat atau publik dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Tanjungpinang dilihat pemantauan dan pengendaliannya diketahui sudah berjalan dengan baik dilihat dari tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi dilapangan, Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang telah ditetapkan kota Tanjungpinang sudah melakukan inovasi dalam menyusun kebijakan dengan permasalahan yang ada dalam mengurangi tingkat inflasi yang tinggi dikota Tanjungpinang dengan mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/infomasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat serta menyampaikan saran dan rekomendasi yang dapat mendukung dalam rangka mewujudkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif (4K). Tim pengendalian inflasi daerah menyampaikan perkembangan harga bahan pokok melalui media publikasi, audio visual dan radio serta melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikukan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dilihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dilihat dari segi aspek responsivitasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah kota Tanjungpinang telah mampu menyusun agenda dan prioritas dalam mengendalikan inflasi daerah. Agenda dan prioritas kegiatan ini telah dilakukan secara terprogram, upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga ditingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada tingkat daerah, selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga didaerah juga berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Peran Tim pengendalian inflasi daerah melaksanakan tugasnya dengan melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa didaerah untuk ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang

eksplisit maupun implisit. Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus mendorong partisipasi aktif daerah didalam memperkuat koordinasi guna stabilitas harga, khususnya melalui pembentukan TPID memperkuat kesepahaman bersama terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah dalam stabilitas harga sesuai dengan prinsip administrasi yang telah ditentukan yaitu bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan reponsibilitas dalam pemantauan dan pengendalian inflasi sudah terlaksana dengan baik dilihat dari pengawasannya dalam pelaksanaan kegiatan program satgas, menyusun laporan pelaksanaan tugas tim pengendalian inflasi daerah yang memuat perkembangan dan prospek inflasi daerah, identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil, rumusan rekomendasi kebijakan, pelaksanaan kebijakn, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana program kerja dan menghimpun serta menginverntarisir data kegaitan pada masing-masing instansi organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi kota Tanjungpinang.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Hal yang utama dari akuntabilitas itu sendiri adalah pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pelayanan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejauh Tim Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berusaha maksimal untuk mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Pengukuran kinerja mencerminkan dua aspek yaitu proses dan keluaran (*output*). Pojaknas TPID menekankan pada aspek penguatan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga didaerah. Dalam kaitan ini beberapa program yang dilaksanakan oleh pojaknas TPID untuk mempekuat aspek kelembagaan ialah menyusun buku pedoman pelaksanaan TPID, pengukuran kinerja pengelolaan inflasi daerah, memfasilitasi pembentukan TPID baru, penyelenggaraan rekor pusat daerah dan rekorwil TPID, serta peningkatan kompetensi anggota TPID. Semakin luasnya partisipasi daerah untuk turut menjaga stabilitas harga perlu didukung adanya suatu pedoman yang dapat terjadi acuan baku di dalam pelaksanaan koordinasi stabilitas harga didaerah. Dalam kaitan ini, pokajnas TPID memprioritaskan pada penguatan aspek kelembagaan melalui penyusunan dasar hukum bagi pelaksanaan TPID.

Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa kinerja TPID kota Tanjungpinang dilihat dari segi akuntabilitas yang telah ditetapkan TPID kota Tanjungpinang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi peraturan yang berlaku, dengan melakukan penyusunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tuagas tim pengendalaian inflasi daerah (TPID) kepada gubernur melalui walikota secara berkala setiap satu bulan sekali serta menghimpun dan menginverntarisir data kegiatan pada masing-masing instansi organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi kota tanjungpinang untuk dipublikasikan melalui website tim pengendalian inflasi daerah kota Tanjungpinang.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja tim pengendalian inflasi daerah (TPID) kota Tanjungpinang dalam mengendalikan inflasi kota Tanjungpinang sudah optimal hal ini dapat dilihat dari dimensi kinerja organisasi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas dan tesponsibilitas serta akuntabilitas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam dimensi produktivitas, Tim pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi daerah sudah produktif. Dalam pemantauan program-program yang dilakukan sudah menjalankan program-program yang menjadi target utamanya, Program-program yang dilaksanakan yaitu rapat koordinasi rutin, pelaksanaan kerjasama pengendalian pendistribusian JBT dengan menggunakan fuelcard, rumah pangan kita (RPK), penerapan strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif) menjadi dengan melihat tingkat inflasi yang stabil.

Dalam dimensi kualitas layanan, dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa kinerja TPID kota Tanjungpinang dilihat dari kualitas layanan dalam pengendalian inflasi daerah sudah baik dilihat dari dilakukannya rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait pengendalian inflasi, merumuskan pengendalian inflasi melalui media publikasi, audio visual dan radio, serta menginventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum, dan melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga.

Dalam dimensi responsivitas, dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa kinerja Tim Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi (TPID) kota Tanjungpinang dilihat dari responvitasnya adalah TPID telah mampu mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi solusi yang dihasilkan dan memerlukan penanganan langsung dari pemerintah pusat dikomukasikan oleh pojaknas TPID kepada kementerian atau lembaga terkait, dengan melakukan intervensi kebijakan strategis yang dapat menstabilkan tingkat inflasi, melakukan analisis permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.

Dalam dimensi responsibilitas, proses responsibilitas TPID kota Tanjungpinang dalam pemantauan menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengkoordinasi kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan TPID dan sesuai administrasi. Tim pengendalian inflasi daerah kota Tanjungpinang dalam menghadapi masalah yang terjadi tentunya dengan langsung mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sesuai permasalahan dalam mewujudkan inflasi yang rendah, menyusun laporan pelaksanaan tugas tim pengendalian inflasi yang memuat perkembangan dan prospektif inflasi daerah dan menginventarisir data kegiatan pada masing-masing instansi yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi di kota Tanjungpinang.

Dalam dimensi akuntabilitas, Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Tanjungpinang telah berusaha memberikan pelayanan dengan maksimal dan transparan. Dalam proses akutabilitas TPID kota Tanjungpinang menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mengkoordinasi kepentingan masyarakat dan menyapikan laporan pelaksanaan tugas tim pengendalian inflsai daerah (TPID) kepada gubernur melalui walikota secara berkala setiap satu bulan sekali serta segala bentuk program yang dilaksanakan oleh tim pemantauan dan pengendalian inflasi (TPID) sudah sesuai dengan upaya dalam menstabilkan inflasi daerah.

V. Daftar Pustaka

Buku:

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2003). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- sugiyono (2015). *Metode penelitian kombinasi (Mix methods)*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 Tentang Tim Pengendalian Inflasi
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Tanjungpinang

Jurnal:

- Ardiansyah, Herman. 2017. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*.
- Aryani, Dwi, and Febrina Rosinta. 2010. "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17(2): 114–26.
- Fitriyani, Dewi. 2014. "Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Cakrawala Akuntansi*.
- Fuanida, A. 2012. "Pengaruh Pelatihan, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Cv. Sapu Dunia Semarang." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis S1 Undip*.
- Heriyanto, Meyzi. 2013. "Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Kebijakan Publik*.
- Ismoyo. 2017. "Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo." 44(1): 18–26.
- Juffri, A L. 2013. "Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun."
- Kalsum, Umi. 2017. "Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Samsuddin. 2016. "Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi)." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*.
- Santoso, Heroe, I Putu Hariyadi, and Prayitno. 2016. "Data Mining Analisa Pola Pembelian Produk." *Teknik Informatika*.
- Sutawijaya, Adrian. 2012. "Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia." *Jurnal Organisasi dan Manajemen*.
- Tampubolon, Biatna Dulbert. 2007. "Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan Sni 19-9001-2001." *Jurnal Standardisasi* 9(February): 106–15.
- Thomy. 2015. "Analisis Inflasi Dengan Pendekatan Panel Dinamis : (Studi Kasus Di Kawasan Jawa , Sumatera Utara , Sumatera Selatan ,." (3): 197–209.
- Wijaya, Yudha Prawira Mandala. 2011. Kesehatan masyarakat "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skabies Pada Santri Di Pondok Pesantren Al-Makmur Tungkar Kabupaten 50 Kota."
- Yusron Solikin, Mohammad. 2016. "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Dan Produk Domestik Bruto (Pdb) Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4(3): 1–7.

Zulpranandy Datau, Aditya (2017). 2017. “Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatiku (Diskominfo) Kota Bandung Dalam Mewujudkan Bandung Smart City GoSugiono.(2003).*Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

sugiyono (2015). *Metode penelitian kombinasi (Mix methods)*. Bandung: Alfabeta

vernance.” *Universitas Komputer Indonesia*.